

Kebijakan Desentralisasi Pendidikan dan Implementasinya dalam Pendidikan di Indonesia

Sumpena¹, Siti Nurhamidah², Cecep Hilman³

^{1,2}Mahasiswa Pascasarjana Institut Madani Nusantara Sukabumi, Indonesia

³Dosen Pascasarjana Institut Madani Nusantara Sukabumi, Indonesia

E-mail: salimsumpena203@gmail.com, sitihamidahalhusni@gmail.com, cecephilman77@gmail.com

Article History: Received: 2022-10-22 || Revised: 2022-11-26 || Published: 2022-12-29

Sejarah Artikel : Diterima: 2022-10-22 || Direvisi: 2022-11-26 || Dipublikasi: 2022-12-29

Abstract

The goal implicit in the decentralization of regional government is regional independence to carry out development in various aspects. This is in line with the nature of decentralization, namely the transfer of government authority by the Central Government to Autonomous Regions to regulate and manage government affairs within the scope of its own territory. Management This new pattern of government management provides space for broad local (regional) community involvement and decision-making made by the Regional Government in providing competitive and quality public services to the community to become more "down-to-earth". In the context of government decentralization, education decentralization contains efforts to bring decision-making closer to the needs of stakeholders, so that on the one hand educational development is more in line with regional characteristics, on the other hand the community's potential can be utilized more. In the end, it is hoped that the decentralization of education will improve the quality and excellence of human resources.

Keywords: *Decentralization of Regional Government; Decentralization of Education.*

Abstrak

Tujuan yang tersirat dalam desentralisasi pemerintahan daerah adalah kemandirian daerah untuk menjalankan pembangunan dalam beragam aspek. Hal ini sejalan dengan hakekat desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam ruang lingkup wilayahnya sendiri. Manajemen Pola baru manajemen pemerintahan tersebut memberikan ruang bagi keterlibatan masyarakat lokal (daerah) secara luas dan pengambilan keputusan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik yang kompetitif dan berkualitas kepada masyarakat menjadi lebih "membumi". Dalam konteks desentralisasi pemerintahan tersebut, desentralisasi pendidikan mengandung upaya mendekatkan pengambilan keputusan pada kebutuhan stakeholders, sehingga di satu sisi pembangunan pendidikan lebih sesuai dengan kekhasan daerah, di sisi lain potensi masyarakat dapat lebih didayagunakan. Pada akhirnya desentralisasi pendidikan ini diharapkan akan meningkatkan mutu dan keunggulan sumberdaya manusia.

Kata kunci: *Desentralisasi Pemerintahan Daerah; Desentralisasi Pendidikan.*

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sesuatu sistem yang sangat dibutuhkan dalam rangka tingkatkan tingkatan intelegensi warga dalam seluruh berbagai aspek. Sebab dengan pembelajaran manusia yang terdapat dalam interaksi sosial bisa bersaing dengan tujuan buat penuhi kebutuhan serta menggapai cita cita yang di idamkan. Bagi ketetapan MPRS Nomor. II tahun 1960, tujuan pembelajaran yakni mencetak generasi kearah mewujudkan sumber energi manusia yang cocok dengan pancasila sehingga bisa bertanggung jawab selaku warga yang adil dan memiliki energi spiritual yang besar. Tujuan dari pembelajaran diatas ialah salah satu tujuan pembelajaran secara universal, serta pada dasarnya tujuan dari pembelajaran nasional merupakan berupaya buat menghasilkan sumber energi manusia baik secara material serta spiritual cocok dengan bukti diri negeri Indonesia ialah Pancasila. Pembelajaran sepatutnya bisa bawa kemajuan serta memproduksi

lulusan yang mumpuni dalam bidangnya. Bila pembelajaran hadapi penyusutan hingga perihal tersebut bisa ditentukan bisa merendahkan pula mutu sosial dimasyarakat yang perihal tersebut bisa dilihat dari lulusan dari sesuatu lembaga. Tetapi pada realitasnya, pembelajaran yang optimal belumlah seluruhnya bisa dialami oleh warga serta perihal ini rasanya tidak kelewatan bila diutarakan dalam ulasan kali ini. Pemerintah selaku salah satu komponen yang harusnya bertanggung jawab secara penuh supaya pembelajaran bisa terlaksana dengan optimal. Tetapi pada realitasnya, pembelajaran belum bisa terlaksana secara optimal serta perihal itu bisa dilihat salah satunya dari bangunan pembelajaran yang telah tidak layak buat digunakan selaku sarana belajar. Tidak cuma itu, apalagi banyak wilayah terpencil yang belum bisa merasakan pembelajaran.

Sistem Sentralistik dialami memiliki dampak yang negatif serta kurang optimal yang perihal tersebut tidak bisa mengakomodir konflik serta permasalahan lokal serta intern sehingga menghasilkan rasa ketergantungan pihak loka dengan pusat sehingga rasa kemandirian menurun apalagi mematikan energi kreasi, inovasi serta kebebasan pembelajaran tingkatan lokal. Dari sebagian perihal tersebut diatas hingga bisa kita tahu dari web- web internet yang mengatakan polling kalau sistem pembelajaran di Indonesia ialah sistem yang terburuk di kawasan Asia. Perihal tersebut disebabkan sebab bangsa kita dikala ini lagi terletak dalam masa transisi ialah terletak dalam masa reformasi yang terdapatnya masa ini bawa bermacam berbagai akibat. Selaku contoh ialah pergantian serta timbulnya Undang- Undang N0. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Wilayah serta Undang- Undang Nomor. 25 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Serta Wilayah. Kemunculan Undang- Undang tersebut ialah kewenangan para pemerintah serta bawa akibat yang sangat otonomi dalam bermacam bidang tercantum bidang pembelajaran. Berbagai studi tentang Desentralisasi memperlihatkan bahwa segala permasalahan yang sifatnya kompleks, dapat diatasi dengan kerja kelompok, mengakibatkan adanya aspek ketidakpastian sehingga menimbulkan situasi yang tidak menentu sehingga tidak bisa diakomodir dengan sistem Sentralistik. Jika dilihat dari fungsi pemerintahan, Desentralisasi atau otonomi menunjukkan:

1. Satuan-satuan Desentralisasi atau otonomi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat;
2. Satuan-satuan Desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan lebih efisien;
3. Satuan-satuan Desentralisasi atau otonomi lebih normatif;
4. Satuan-satuan Desentralisasi atau otonomi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang tinggi, komitmen yang lebih produktif.

Istilah Desentralisasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *de* yang berarti lepas dan *contium* yang berarti pusat. Oleh karena itu Desentralisasi diartikan melepaskan diri dari pusat. Dari definisi tentang Desentralisasi tersebut maka dapat difahami bahwa aktifitas Desentralisasi pada hakekatnya adalah aktifitas dalam usaha pelimpahan wewenang yang berasal dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Sehingga dengan adanya wacana Desentralisasi yang telah menjadi wewenang dan Undang -Undang tersebut maka sekolah harus mempunyai kesiapan yang dalam hal ini berfungsi sebagai tempat pelaksanaan operasional dan lembaga formal pendidikan. Adapun dampak dari proses Desentralisasi tersebut adalah penerapan pendidikan secara mandiri yang awalnya dikelola dengan sistem Sentralisasi. Adapun model dan metode yang digunakan dalam penerapan Desentralisasi pendidikan ini adalah model manajemen berbasis sekolah (MBS) atau School Based Management (SBM). Manajemen berbasis sekolah (MBS) adalah suatu cara untuk memajukan mutu pendidikan dengan pelimpahan kebijakan pengambilan keputusan yang seyogyanya berasal dari pemerintah pusat kepada daerah masing-masing lembaga, yang hal tersebut menjadikan kepala sekolah, guru, peserta didik, dan wali murid mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap kegiatan belajar mengajar dilembaga atau disekolah, dan yang tak kalah penting adalah bahwa sekolah mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar dalam mengambil keputusan dalam bidang keuangan dan kurikulum sekolah.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu menganalisis atau mengkaji lebih dalam suatu konsep atau fenomena sosial yang memiliki sifat kasus. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan

menggunakan literature (kepuustakaan) dari penelitian sebelumnya. Teknik yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi yaitu mengkaji atau menginterpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan tersebut berupa catatan yang terpublikasikan, buku teks, dan jurnal artikel. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deduktif. Menurut Busrah, mengatakan deduktif adalah cara berfikir bertolak dari pernyataan yang bersifat umum menarik kesimpulan yang bersifat khusus (Sutarto et al. 2021).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian desentralisasi pendidikan

Desentralisasi pendidikan merupakan suatu proses yang lingkungan serta bisa bawa perubahan- perubahan berarti tentang metode sistem pembelajaran menghasilkan kebijakan, memperoleh sumber energi, menghasilkan dana, melatih guru, menyusun kurikulum, serta mengelola sekolah- sekolah. Pembelajaran sangat berarti untuk pembangunan ekonomi, serta sistem persekolahan ialah wahana buat menguatkan pengaruh-pengaruh politik dan melaksanakan program serta tujuan para penguasa. Berhasil ataupun gagalnya upaya desentralisasi persekolahan kerap kali lebih didetetapkan oleh alasan- alasan politis dari pada rancangan teknis. Program- program desentralisasi sangat bermacam- macam antara satu negeri dengan negeri yang lain. Sehubungan dengan perihal itu, dalam penafsiran ini, perkara desentralisasi mengaitkan bukan cuma faktor pembelajaran (dalam penafsiran pengajaran serta pembelajaran lewat pengajaran) itu sendiri, namun pula unsur-unsur administratif serta finansial. Tidak hanya itu, sebab pembelajaran secara tidak langsung terpaut dengan kebijakan politis, hingga seluruh upaya buat mengganti kebijakan serta bermacam perihal yang terpaut dengan pembelajaran dibutuhkan upaya lewat jalan politis. Apabila menyepakati gagasan yang menganjurkan kalau perancangan pembelajaran sepatutnya diawali dengan mengenali kepentingan seluruh pihak yang ikut serta, baik individual ataupun kelompok, hingga pihak-pihak yang berkepentingan tersebut merupakan pemerintah, penyelenggara sekolah, guru, dosen, orang tua serta bermacam assosiasi handal di bidang pembelajaran, lembaga- lembaga swadaya warga, dan kelompok agama. Sehubungan dengan perihal itu, Pemerintah, dengan mengacu kepada masukan dari seluruh yang disebutkan di atas, cuma merangkai kerangka bawah. Pemerintah dapat menetapkan tujuan universal serta mempersiapkan sumber- sumber energi di bidang pembelajaran, namun pengelolaan dari hari ke hari diserahkan ke otoritas yang lebih rendah, apalagi ke sekolah- sekolah. Sekolahpun wajib mencermati masukan dari orang tua serta area sekitarnya. Masukan ini kemudian jadi bagian dari sistem pengajaran serta pembelajaran yang lebih luas, sehingga pada kesimpulannya pembelajaran berkembang selaku proses dialektika antara sistem serta warga. Kebijakan pemerintah dalam tingkatkan mutu pembelajaran tersebut dikeluarkan lewat kebijakan desentralisasi pembelajaran ataupun Decentralized Basic Education Project (DBEP).

B. Konsep Dasar Desentralisasi Pendidikan

Berlakunya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada hakekatnya menjadi angin segar bagi perkembangan pemerintahan di daerah, karena Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan serta keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dari masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu uoaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, lebih adil dan lebih sejahtera. Desentralisasi dimaksud selaku penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada wilayah otonom buat mengendalikan serta mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Bidang pembelajaran pula ialah bidang yang tercantum dalam garapan kewenangan wilayah otonom yang diketahui dengan desentralisasi pembelajaran. Kewenangan pengelolaan pembelajaran berganti dari sistem sentralisasi kesistem desentralisasi, desentralisasi pembelajaran berarti terbentuknya pelimpahan kekuasaan serta wewenang yang lebih luas kepada wilayah buat membuat perencanaan serta mengambil keputusannya sendiri dalam menanggulangi kasus yang dialami.

Bersumber pada PP No 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah serta kewenangan provinsi selaku wilayah Otonom, pada kelompok bidang pembelajaran serta kebudayaan disebutkan kalau kewenangan pemerintah meliputi hal-hal selaku berikut:

1. Penetapan standar kompetensi siswa serta masyarakat belajar, dan pengaturan kurikulum nasional serta evaluasi hasil belajar secara nasional, dan pedoman penerapannya;
2. Penetapan standar modul pelajaran;
3. Penetapan persyaratan perolehan serta pemakaian gelar akademik;
4. Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pembelajaran;
5. Penetapan persyaratan penerimaan, pemindahan, sertifikasi siswa, masyarakat belajar serta mahasiswa.

Sedangkan itu, kewenangan pemerintah provinsi meliputi hal-hal yang sebagaimana diuraikan berikut:

1. Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa serta mahasiswa dari warga minoritas, terbelakang, serta ataupun tidak sanggup;
2. Penyediaan dorongan pengadaan novel pelajaran pokok/ materi pembelajaran buat tamman anak-anak, pembelajaran bawah, pembelajaran menengah, serta pembelajaran luar biasa;
3. Menunjang/menolong penyelenggaraan pembelajaran besar tidak hanya pengaturan kurikulum, akreditasi, serta kenaikan tenaga akademis.
4. Penyelenggaraan sekolah luar biasa serta balai pelatihan serta ataupun penyusunan guru;
5. Penyelenggaraan museum provinsi, suaka aset sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah serta nilai tradisional, dan pengembangan bahasa serta budaya wilayah.

Kemudian kebijakan otonomi pembelajaran dalam konteks otonomi wilayah selaku berikut, antara lain:

1. Secara general otonomi pembelajaran mengarah pada upaya tingkatkan kualitas pembelajaran selaku jawaban atas kekeliruan yang terjalin sepanjang kurang lebih 20 tahun belum lama ini yang lebih mementingkan perkara kuantitas;
2. Pada sisi otonomi wilayah, otonomi pembelajaran menuju pada menipisnya kewenangan pemerintahan berlabel pembelajaran yang wajib diiringi dengan tumbuhnya pemberdayaan serta partisipasi warga;
3. Ada kemampuan tarik menarik antara otonomi pembelajaran dalam konteks otonomi wilayah kala menempatkan kepentingan ekonomik serta finansial selaku kekuatan tarik menarik antara pemerintahan wilayah otonom serta institusi pembelajaran;
4. Kejelasan tempat untuk institusi-institusi pembelajaran butuh dirumuskan supaya otonomi pembelajaran bisa berjalan cocok pada relnya;
5. Pada tingkatan persekolahan, otonomi pembelajaran otonomi pembelajaran wajib berjalan atas bawah desentralisasi serta prinsip School Based Management pada tingkatan pembelajaran bawah serta menengah, penyusunan kelembagaan pada tingkat serta tempat yang jadi aspek kunci keberhasilan otonomi pembelajaran.
6. Telah selayaknya bila desentralisasi pembelajaran wajib mengedepankan prinsip akuntabilitas sebab berkaitan erat dengan pendanaan serta pembiayaan pembelajaran;
7. Pada tingkat pembelajaran besar, kebijakan otonomi masih senantiasa terletak dalam kerangka otonomi keilmuan;
8. Dalam konteks otonomi wilayah, kebijakan otonomi pembelajaran besar bisa ditempatkan bukan pada kepentingan wilayah semata, melainkan pada realitas kalau pembelajaran besar merupakan peninggalan nasional;
9. Secara makro, apapun yang tercantum di dalamnya, otonomi pembelajaran besar haruslah menonjolkan keunggulan-keunggulannya.

Desentralisasi pembelajaran berbeda dengan desentralisasi bidang pemerintahan yang lain dalam perihal aplikasi. Bila desentralisasi bidang-bidang pemerintahan lain terletak pada pemerintahan di tingkatan kabupaten/kota, hingga desentralisasi di bidang pembelajaran tidak menyudahi pada tingkatan kabupaten/kota, namun hingga pada lembaga pembelajaran ataupun sekolah selaku ujung tombak penerapan peendidikan. Dalam aplikasi desentralisasi

pembelajaran, hingga dibesarkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Sedangkan itu, bagi Depdiknas (Zainuddin, 2008: 60- 63) fungsi- fungsi yang bisa didesentralisasikan ke sekolah merupakan selaku berikut:

1. Perencanaan serta penilaian program sekolah

Sekolah diberi kewenangan buat melaksanakan perencanaan cocok dengan kebutuhannya, misalnya kebutuhan buat tingkatkan kualitas sekolah. Sekolah pula diberi wewenang buat melaksanakan penilaian, spesialnya penilaian internal ataupun penilaian diri.

2. Pengelolaan kurikulum

Sekolah bisa meningkatkan kurikulum, tetapi tidak boleh kurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional yang dibesarkan oleh pemerintah pusat. Sekolah pula diberi kebebasan buat meningkatkan kurikulum muatan lokal. Tidak hanya pengelolaan kurikulum, sekolah pula mendapatkan wewenang dalam pengelolaan: a) proses belajar mengajar, b) ketenagaan, c) perlengkapan serta peralatan, d) keuangan, e) siswa, f) ikatan sekolah dengan warga, serta gram) hawa sekolah.

C. Implikasi Desentralisasi Pendidikan

Mengalami masa yang serba terbuka di alam demokrasi ini orang hendak melaksanakan pilihan- pilihan rasional, utamanya dalam dunia pembelajaran. Orang tidak hendak cuma melaksanakan opsi atas bawah ikatan paternalistik ataupun pula atas bawah loyalitas kelompok ataupun mengerti/ pandangan hidup tertentu. Bila lebih dahulu, warga dalam membagikan pengakuan terhadap lembaga pembelajaran didasarkan atas penghargaan pemerintah, hingga ke depan justeru warga yang hendak membagikan ukuran- ukuran tentang kekuatan tiap- tiap lembaga pembelajaran. Seperti itu sebabnya lembaga pembelajaran wajib lebih terbuka serta sanggup memandang tuntutan riil masyarakatnya. Pada masa otonomi tersebut mutu pembelajaran hendak sangat didetetapkan oleh kebijakan pemerintah wilayah. Kala pemerintah wilayah mempunyai political will yang baik serta kokoh terhadap dunia pembelajaran, terdapat kesempatan yang lumayan luas kalau pembelajaran di wilayah bersangkutan hendak maju. Kebalikannya, kepala wilayah yang tidak mempunyai visi yang baik di bidang pembelajaran bisa ditentukan wilayah itu hendak hadapi stagnasi serta kemandegan mengarah pemberdayaan warga yang well educated, tidak hendak sempat menemukan momentum yang baik buat tumbuh. Kebijakan pemerintah berbentuk pemberian otonomi wilayah, ingin tidak ingin menuntut lembaga otonomi wilayah mempunyai kemandirian, terbuka serta hirau dengan tuntutan era serta sanggup berkompetisi dengan lembaga- lembaga pembelajaran yang lain. Kemandirian wajib ditempuh serta tidak selayaknya lagi menunggu dari atas. Mereka bukan hanya melaksanakan peran- peran selaku pelaksana sebagaimana yang terjalin pada masa lebih dahulu.

Menimpa akibat implementasi UU otonomi wilayah tersebut, Menteri Pembelajaran Nasional pada rapat koordinasi pejabat kementerian agama Pusat serta Wilayah, bertepatan pada 29 November 1999, sudah mengemukakan 6 kasus dalam penerapan UU tersebut, ialah: permasalahan kepentingan nasional, kualitas pembelajaran, efisiensi pengelolaan, pemerataan, kedudukan dan warga serta akuntabilitas. Dalam konteks kepentingan nasional, permasalahan yang butuh diantisipasi merupakan: awal, gimana kita bisa menjamin kalau harus belajar pembelajaran bawah 9 tahun bisa diselesaikan di seluruh wilayah kabupaten serta wilayah kota dalam waktu yang relative sama, sedangkan kemampuan serta keahlian wilayah berbedabeda. Kedua, gimana kita bisa mengamankan program pembelajaran serta kebudayaan yang bisa membagikan kesempatan kreativitas serta keragaman wilayah, namun seluruhnya menuju secara sentripetal ke kepentingan nasional lewat muatan yang sama dalam upaya pembuatan “national character building”. Ketiga pembelajaran ialah investasi jangka panjang, yang kadang- kadang kurang menarik untuk sebagian pejabat wilayah, sebab hasilnya tidak bisa dilihat serta dinikmati, kebalikannya pembangunan raga ialah investasi jangka pendek yang lekas bisa dilihat. Sebab itu, gimana melindungi supaya sumber dana buat pembelajaran bisa terjamin serta mendapatkan prioritas dalam alokasi anggaran wilayah?, keempat, menyangkut pembelajaran agama yang tercantum perkara mendasar yang rawan, sehingga kepentingan nasional buat membentuk warga religius dalam warga Indonesia yang pluralistik

bisa jadi perkara dalam penerapan di lapangan bila tidak diatur serta tidak terdapat rambu-rambu yang mencukupi.

Dalam konteks kualitas pembelajaran, permasalahannya merupakan diberlakukannya UU otonomi wilayah tersebut apakah bisa dipastikan kualitas pembelajaran tiap-tiap wilayah, khususnya lembaga-lembaga pembelajaran Islam yang nota benanya "kurang siap" paling utama dalam rangka memenuhi standar nasional serta internasional buat mengalami persaingan global, sebaliknya mutu sumber energi, prasarana serta keahlian pembiayaannya dapat sangat berbeda. Dalam konteks pemerataan, otonomi di bidang pembelajaran bisa tingkatkan aspirasi warga hendak pembelajaran yang diperkirakan pula hendak meningkatnya pemerataan mendapatkan peluang pembelajaran. Namun hendak terus menjadi dibayar mahal dengan terus menjadi tingginya jarak antar wilayah dalam pemerataan hendak sarana pembelajaran yang kesimpulannya hendak mendorong meningkatnya kepincangan dalam kualitas hasil pembelajaran. Tanpa intervensi pengelolaan, anggota warga dari wilayah kabupaten/kota yang kaya dengan jumlah penduduk sedikit hendak menikmati sarana lebih baik dari anggota warga dari kabupaten/kota yang miskin. Pendekatan sentralistis pastinya susah mengadaptasikan kurikulum dengan kebutuhan area. Oleh sebab itu, program pembelajaran haruslah merefleksikan kebutuhan bawah manusia supaya dia layak serta lumayan intelegen hidup dalam lingkungannya. Kebalikannya, kurikulum yang sangat berorientasi kepada area hendak kurangi pengetahuan pembuatan karakter partisipan didik dan menghalangi horizon penalarannya. Dengan menyadari kekurangan-kekurangan ini, pendekatan desentralisasi hendak banyak khasiatnya buat memenuhi guna pedagogis dari sistem pembelajaran nasional. Apa yang kita angan-angankan menimpa "muatan lokal" dari kurikulum, pada hakikatnya ialah penyesuaian kurikulum nasional yang baku terhadap unsur-unsur area.

Terdapatnya Otonomi wilayah tersebut yang berimplikasi pada otonomi pembelajaran, ialah tantangan tertentu untuk lembaga pembelajaran Islam semacam tersebut di atas buat bisa eksis serta bertahan dalam masa persaingan "global" dengan membagikan sesuatu tawaran serta terobosan baru, sebab jika tidak, lembaga pembelajaran Islam di bermacam wilayah hendak dikalahkan oleh lembaga-lembaga pembelajaran universal yang lebih menawarkan hal-hal menarik dalam dunia pembelajaran. Di antara tantangan-tantangan lain yang hendak dialami oleh lembaga pembelajaran Islam di sebagian wilayah ialah:

1. Tantangan yang berkaitan dengan ketidak siapan lembaga pembelajaran Islam di sebagian wilayah dalam mengadakan bermacam renovasi-renovasi pada aspek kurikulum yang dipergunakan dalam kenaikan kualitas serta mutu lembaga pembelajaran itu. Lemahnya upaya renovasi tersebut selaku akibat dari sentralisasi pendidikan yang berlangsung pada masa dulu, sehingga menimbulkan ketergantungan yang besar kepada pusat, yang pada kesimpulannya meningkatkan ketakutan serta kekhawatiran dalam penataan kurikulum yang bisa mengapresiasi terhadap bermacam kepentingan social, budaya wilayah. Dampaknya kurikulum yang terdapat pada lembaga pembelajaran Islam di sebagian wilayah senantiasa semacam dahulu tanpa terdapat pengayaan kurikulum baru, sehingga tidak mengapresiasi tuntutan kebutuhan warga di dekat lembaga pembelajaran tersebut. Dampaknya, arah pembelajaran yang dilaksanakan tidak cocok apa yang jadi harapan warga serta area dekat.
2. Lemahnya pengadaan renovasi dalam aspek kurikulum ini, tidak hanya factor di atas, pula diakibatkan oleh lemahnya mutu sumber energi manusia (SDM) di sebagian wilayah, sehingga membatasi terhadap pengembangan serta pengayaan kurikulum yang terdapat. Oleh sebab itu, dibutuhkan sesuatu usaha keras dari bermacam lembaga pembelajaran Islam di bermacam wilayah buat menanggulangi perihal tersebut, di antara lain merupakan dengan melaksanakan terobosan-terobosan baru dalam aspek kenaikan mutu sumber energi manusianya dengan bermacam metode, disamping kurangi watak ketergantungan yang besar kepada pemerintahan pusat. Dengan metode demikian, hingga renovasi serta pengayaan kurikulum lembaga pembelajaran Islam di sebagian wilayah yang mengapresiasi terhadap kebutuhan daerahnya hendak bisa terwujud.
3. Disamping itu, problematika yang dialami oleh lembaga pembelajaran Islam di sebagian wilayah berkaitan dengan kebijakan serta keinginan pemerintah (political will) dalam

upaya menopang serta memajukan pembelajaran di daerahnya. Pada realitasnya, masih terdapat sebagian wilayah yang pemerintahnya kurang mencermati aspek pembelajaran, sehingga dana yang dikucurkan dalam APBD di bidang pembelajaran sangat sedikit. Perihal ini berimplikasi pada lambatnya pertumbuhan dari aspek pembelajaran di wilayah, yang menimbulkan masyarakatnya kurang bermutu di dalam sumber energi manusianya.

Mengalami problematika yang sedemikian rumit, hingga perihal ini jadi tanggung jawab warga di wilayah dengan metode membagikan masukan serta kontribusi kepada pemerintah wilayah supaya biar mencermati serta tingkatkan APBD di bidang pembelajaran. Dengan metode inilah diharapkan sanggup menyadarkan pemerintah dalam mengupayakan kemajuan di bidang pembelajaran. Hendak namun, realitas ini hendak jadi lain kala hambatan daerah dalam pengembangan pembelajaran berkaitan dengan kecil serta minimnya pemasukan serta pemasukan wilayah setempat. Kala hal tersebut terjalin, hingga yang wajib dicoba oleh pemerintah wilayah merupakan mengkonsultasikan dengan pemerintah pusat tentang bermacam kebijakan otonomi wilayah yang diberlakukan di daerahnya. Berikutnya merupakan berkaitan dengan kesiapan faktor pembelajaran di sebagian wilayah dalam mengalami persaingan global. Kala wilayah tidak sanggup dalam mempersiapkan sebagian tenaga yang professional dalam bermacam bidang pendidikannya, hingga ingin tidak ingin, wilayah tersebut hendak jauh tertinggal apabila dibanding dengan wilayah yang lain. Realitas yang hendak dialami merupakan pembelajaran di wilayah tidak hendak menciptakan produk serta out put yang mumpuni serta professional pada bidangnya. Oleh sebab itu, perihal tersebut haruslah jadi catatan berarti untuk lembaga pembelajaran Islam di bermacam wilayah supaya biar mempunyai strategi jitu dalam mengalami masa otonomi pembelajaran dalam penyiapan tenaga yang professional di bermacam bidang. Metode yang bisa dicoba oleh wilayah merupakan dengan mengadakan riset banding dengan wilayah lain selaku sesuatu analisa terhadap bermacam kekurangan wilayah buat setelah itu ditindak lanjuti dengan pengayaan keilmuan serta keahlian kerja secara professional.

Keahlian dari konsep desentralisasi buat menggapai ataupun sangat tidak mendekati esensinya, hendak sangat ditetapkan oleh gimana proses pengambilan keputusan ataupun konsep itu sendiri dicoba. Idealnya, proses pengambilan keputusan atas kebijakan desentralisasi pembelajaran wajib dicoba lewat "bargaining" yang dinamis antara state serta society. Dengan mekanisme ini, walaupun pada kesimpulannya konsep desentralisasi wajib dilaksanakan, hingga kehadirannya betul-betul ialah refleksi kemauan dari pihak state serta society. Dari sebagian tantangan yang dialami oleh bermacam lembaga pembelajaran Islam tersebut di atas, hingga hendak bisa dikenal kalau kasus dalam pengimplementasian Undang-undang Pemerintah tentang Otonomi Wilayah 1999 di bidang pembelajaran bisa dipetakan dalam kasus kepentingan nasional, kasus kualitas pembelajaran, efisiensi pengelolaan, pemerataan, kedudukan dan warga serta akuntabilitas. Keahlian dari konsep desentralisasi buat menggapai ataupun sangat tidak mendekati esensinya, hendak sangat ditetapkan oleh gimana proses pengambilan keputusan ataupun konsep itu sendiri dicoba. Idealnya, proses pengambilan keputusan atas kebijakan desentralisasi pembelajaran wajib dicoba lewat "bargaining" yang dinamis antara state serta society. Dengan mekanisme ini, walaupun pada kesimpulannya konsep desentralisasi wajib dilaksanakan, hingga kehadirannya betul-betul ialah refleksi kemauan dari pihak state serta society. Dari sebagian tantangan yang dialami oleh bermacam lembaga pembelajaran Islam tersebut di atas, hingga hendak bisa dikenal kalau kasus dalam pengimplementasian Undang-undang Pemerintah tentang Otonomi Wilayah 1999 di bidang pembelajaran bisa dipetakan dalam kasus kepentingan nasional, kasus kualitas pembelajaran, efisiensi pengelolaan, pemerataan, kedudukan dan warga serta akuntabilitas.

D. Manajemen Pendidikan Era Desentralisasi Pendidikan

Desentralisasi pembelajaran ialah upaya dari pemerintah pusat buat mengelola pembelajaran dalam masa globalisasi. Pengelolaan ini ialah strategi dari pemerintah pusat buat mempermudah dalam mengendalikan pertumbuhan pembelajaran serta pula dinilai lebih efisien dibanding dengan sentralisasi. Desentralisasi pembelajaran bertujuan buat kurangi intervensi pejabat pusat ataupun satuan dalam urusan pembelajaran yang wajib diputuskan

oleh satuan di bawahnya, pemerintah wilayah ataupun warga, serta dilaksanakan (Hidayati, 2016). Pada dikala Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 disahkan, hingga terjalin pergantian yang fundamental terhadap pembangunan yang awal mulanya sentralisasi ke desentralisasi serta tercantum didalamnya desentralisasi pembelajaran. Kenaikan kualitas pembelajaran lewat mekanisme otonomi wilayah mengganti arah serta pola penyelenggaraan pembelajaran yang lebih dahulu dari model sentralisasi jadi desentralisasi (Tilaar, 2017). Kebijakan ini diharapkan membagikan akibat yang positif untuk dunia pembelajaran Indonesia serta bisa menuntaskan masalah- masalah pembelajaran nasional salah satunya merupakan permasalahan kualitas pembelajaran. Sejalan dengan pertumbuhan dunia pembelajaran, implementasi dari kebijakan desentralisasi pembelajaran masih tidak penuh harapan. Perihal ini merujuk kepada pengelolaan pembelajaran yang masih kokoh di tangan birokrasi di pemerintahan wilayah dibanding dengan sekolah. Perpindahan wewenang antara pusat ke provinsi serta provinsi ke kabupaten yang setelah itu diiringi perpindahan sumber energi manusia yang tidak diiringi dengan pola pikir serta perilaku yang kondusif.

Otonomi serta desentralisasi pembelajaran ini bukan buat memindahkan permasalahan pembelajaran nasional pusat ke wilayah, serta begitu pula dengan pengelolaan (otonomi) pembelajaran yang bertujuan buat tingkatkan kualitas pembelajaran di susunan warga, otonomi, serta desentralisasi pula bukan buat memindahkan beban kasus pembelajaran dari pusat yang setelah itu dilimpahkan ke pemerintah wilayah. Namun tujuan dari kebijakan ini merupakan buat membagikan hak pemerintah wilayah dalam tingkatkan kemampuan sumber energi manusia dalam tingkatkan kualitas pembelajaran di wilayah tiap- tiap. Tiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak terlepas dari kelebihan serta kekurangan. Begitu pula dengan kebijakan desentralisasi ini, memandang dari sisi positif kebijakan ini pemerintah wilayah lebih bebas buat melaksanakan pembinaan terhadap sumber energi manusia. Kebijakan ini pula membagikan keleluasaan kepada lembaga pembelajaran buat melaksanakan pengelolaan terhadap lembaga yang bertujuan buat membagikan peluang kepada sumber energi manusia yang berkompeten buat lebih memakai kompetensi yang dipunyai dalam membetulkan pengelolaan lembaga, dalam perihal ini memerlukan kepemimpinan dari seseorang pemimpin yang memiliki tujuan kepada kenaikan kualitas pembelajaran. Lewat otonomi pembelajaran, sekolah diberi kewenangan yang besar dalam mengelola lembaga pembelajaran (sekolah) kewenangan ini meliputi manajemen perencanaan serta penilaian program sekolah, manajemen kurikulum, manajemen proses belajar mengajar, manajemen fasilitas/ prasarana, manajemen keuangan, manajemen pelayanan siswa, manajemen ikatan sekolah dengan warga, dan manajemen hawa sekolah yang cocok dengan amanat di dalam Undang- undang sistem pembelajaran nasional. Terdapatnya kewenangan yang besar ini, kepala sekolah selaku pemimpin dituntut buat melaksanakan inovasi serta memberdayakan sumber energi manusia secara optimal dalam menggapai mutu sekolah yang baik sebab kepala sekolah ialah figur kunci dalam mendesak kemajuan sekolah.

Dengan menempatkan sekolah selaku penyelenggara pembelajaran saat sebelum otonomi pembelajaran terdapat, hingga penyelenggaraan pembelajaran nasional dicoba secara birokratis, dengan sekolah sangat tergantung pada birokrasi dengan jalur yang sangat panjang, terkadang kebijakan yang ditetapkan cocok dengan keadaan sekolah. Tidak hanya itu, penerapan otonomi sekolah yang sudah dilaksanakan sepanjang ini belum menggapai hasil yang memuaskan bersumber pada penanda kualitas pembelajaran di negara- negara yang kesenjangan pendidikannya terus menjadi melebar di segala negara serta kualitas pendidikannya jadi jauh lebih lelet di kancah internasional. Negeri lain apalagi negeri semacam Asia Tenggara. Walaupun mutu pembelajaran di Indonesia terus bertambah, tetapi kualitasnya masih sangat rendah dibanding dengan negeri orang sebelah. Pengelolaan otonomi sekolah yang belum dikelola secara maksimal oleh pendidik serta tenaga kependidikan diperparah dengan minimnya pemahaman warga buat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sekolah. Kasus dalam dunia pembelajaran terus menjadi meningkat dengan berkembangnya era, perihal ini wajib menemukan atensi penuh dari para praktisi pembelajaran serta pemangku kebijakan dengan membetulkan sistem pembelajaran nasional yang menuju kepada revisi sumber energi manusia.

Kepemimpinan Pembelajaran dalam Tingkatkan Kualitas Lembaga Pembelajaran Kepemimpinan" pembelajaran yang beorientasi pada kualitas sangat diperlukan dalam tingkatkan mutu lembaga pembelajaran yang dipandu. Memaknai kepemimpinan dalam makna luas sangat bermacam- macam. Asrin serta Arwildyanto memaknai kepemimpinan dikala ini mempunyai muatan sosial budaya yang lebih kokoh. Ini dikira selaku sistem sosial dengan kepemimpinan sosiokultural sebab didasarkan pada citra sosiologis yang kokoh dari organisasi yang memiliki donasi buat membangun budaya organisasi yang sehat. Rosmiati serta Kurniady (2017) menggambarkan kalau secara universal penafsiran kepemimpinan merupakan keahlian serta keinginan seorang buat pengaruhi, mendesak, mengajak, membimbing, menggerakkan, memusatkan serta apabila butuh memforsir orang ataupun kelompok buat menerimanya pengaruhi serta setelah itu berperan, suatu yang bisa menolong menggapai tujuan tertentu sudah diresmikan. Bila memandang pada konteks Total Quality Management lembaga pembelajaran yang diartikan dalam tulisan ini merupakan sekolah yang ialah suatu lembaga pembelajaran yang wajib lebih ditingkatkan mutu manajemen pengelolaan sumber energi manusia, komponen internal sekolah ataupun komponen eksternal sekolah dalam pengelolaan kualitas sekolah. Bila didukung oleh budaya organisasi yang kokoh, kepemimpinan sekolah hendak efisien. Semacam yang dikemukakan oleh Fred, Robbins serta Lussier yang dilansir oleh (Munirom, 2021), pemimpin yang efisien merupakan pemimpin yang mengorganisasikan organisasinya dengan metode yang sangat terstruktur, serta mempunyai persahabatan yang sangat kokoh, berlagak baik, silih yakin, silih menghormati, serta berlagak hangat kepada bawahannya. Kepemimpinan dapat membagikan orientasi pada terjadinya budaya organisasi yang kokoh (Strong Cultural) perihal ini bertujuan buat menggapai tujuan sekolah. Sekolah selaku suatu lembaga pembelajaran ialah wadah dalam proses pembelajaran yang mempunyai sistem yang dinamis, sekolah merupakan mengelola sumber energi manusia (SDM) yang diharapkan menciptakan lulusan yang bermutu cocok dengan tuntutan kebutuhan warga dan pada gilirannya lulusan sekolah diharapkan bisa membagikan donasi kepada pembangunan bangsa.

Sebaliknya dalam perspektif Islam Rasulullah menegaskan kalau "Tiap kalian merupakan pemimpin serta tiap pemimpin tentu hendak dimohon pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnnya." Bila memandang dalam konteks dunia pembelajaran penyelenggaraan pembelajaran membutuhkan wujud pemimpin yang baik, andal serta terampil. Bagi Nizar (2019)" kepemimpinan pada lembaga pembelajaran yang sangat dibutuhkan merupakan yang sanggup memusatkan pada budaya mutu (quality culture) sehingga tiap personel dalam lingkup pembelajaran hendak menguasai apa yang hendak dicapai oleh lembaga pembelajaran. Oleh sebab itu, pemimpin beradab serta beretika yang hendak menekankan pada orientasi manusia (human oriented) sangat berarti buat jadi ketentuan untuk kegiatan revisi kualitas dalam lembaga pembelajaran." Buat menggapai perihal ini hingga dibutuhkan sistem pengelolaan yang baik yang dicoba pemimpin sekolah dengan menguatkan budaya organisasi dalam sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah dalam budaya sekolah memperjelas tujuan serta misi sekolah, nilai-nilai sekolah, keunikan sekolah, sistem simbol sekolah, serta kohesi organisasi, bersumber pada rasa silih yakin serta komitmen antara guru, siswa serta warga. Kepala sekolah butuh membangun budaya sekolah yang kokoh guna tingkatkan efisiensi sekolah dalam menggapai tujuannya. Mantja "dalam Asrin" melaporkan kalau kepala sekolah mempunyai 3 kedudukan ialah manajer, pemimpin serta direktur pembelajaran, kepala sekolah wajib menguatkan kerjasama dengan guru, siswa, staf, orang tua, serta lain-lain. Oleh sebab itu pengembangan budaya organisasi ialah upaya buat meningkatkan berkinerja besar (high performance), budaya kerja yang baik hendak menciptakan budaya kerja serta sinergitas besar. Keahlian kepala sekolah selaku pemimpin lembaga buat membangun hawa sekolah yang terbuka bisa membagikan pengaruh serta akibat pada kinerja organisasi, kepala sekolah dituntut mengartikulasi, mensosialisasi serta mengimplementasi visi sekolah, sertamengartikulasi visi dengan tujuan supaya seluruh pihak menguasai visi." Supaya" bisa tingkatkan pengelolaan kemampuan dirinya dalam tingkatkan kinerja kerja, kepala sekolah wajib mengelola kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dalam mengelola sekolah. Kepala sekolah yang berhasil manakala dia sanggup mengelola pribadinya secara optimal guna menunjang pencapaian tujuan organisasi. Tidak hanya itu, budaya sekolah

bisa dilihat dari donasi kepala sekolah terhadap pengembangan budaya tata kelola organisasi. Budaya tata kelola ini nampak dari upaya kepemimpinan kepala sekolah yang menitikberatkan pada nilai-nilai buat tingkatkan daya guna serta efisiensi organisasi, sehingga bisa mendesak kenaikan kinerja tiap elemen sekolah. Budaya tata kelola sekolah ialah perwujudan budaya sekolah yang sangat kokoh”.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Bermacam berbagai kasus serta tantangan desentralisasi pembelajaran wajib dialami dengan kearifan sejalan dengan penerapan desentralisasi pemerintahan wilayah. Gimana wilayah mempersiapkan diri (serta pula sekolah ataupun lembaga pembelajaran) menerima serta melakukan desentralisasi pembelajaran, tercantum kesiapan aparatur pemerintah wilayah dalam melakukan desentralisasi pemerintahan wilayah, supaya tidak terjalin kegagapan birokrasi. Kemandirian selaku tuntutan desentralisasi pembelajaran pada wilayah kabupaten/kota lebih menekankan pada kemandirian dalam mengelola serta memberdayakan bermacam sumberdaya yang dipunyai buat mengimplementasikan kebijakan yang telah diresmikan oleh otoritas pusat serta propinsi. Memandang sumberdaya yang ada di wilayah, hingga tiap wilayah berbeda-beda dalam menanggulangi urusan pembelajaran. Perbandingan ini nampak dalam mengorganisasikan lembaga pengelola pembelajaran, sebaliknya buat pengorganisasian lembaga penyelenggara pembelajaran senantiasa menganut syarat nasional tentang tipe serta jenjang pembelajaran. Dalam perihal ini Pemerintah Pusat (negeri) wajib memfokuskan pada proses serta insentif buat menghasilkan *accountability* (akuntabilitas) serta persaingan. Apabila Pemerintah Wilayah lemah serta tidak responsif, revisi dicoba dalam konteks *horizontal accountability* (pertanggungjawaban pada warga) serta *vertical accountability* (pertanggungjawaban pada Pemerintah Pusat) buat menggapai kapabilitas negeri yang lebih besar (Hermanto, 1999). Masa reformasi serta masa globalisasi yang diisyaratkan dengan transparansi, keterbukaan, serta akuntabilitas ialah area yang kondusif buat melakukan serta meningkatkan desentralisasi pemerintahan wilayah (serta pula desentralisasi pembelajaran).

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Kebijakan Desentralisasi Pendidikan dan Implementasinya dalam Pendidikan di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Amnur, Ali Muhdi (2007) *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Fahima, h. 141-142
- Departemen Pendidikan Nasional. *Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah – Buku 1*. Jakarta: Depdiknas, 2001.
- Fattah, Nanang, (2004) *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, h.15
- Hadiyanto. (2004) *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, h. 67
- Hidayat, Syarif, (2000) *Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan ke Depan*, Jakarta: Pustaka Quantum, 2000 h,23
- Indrakusuma, Amier Dien. (1973) *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Surabaya: Usana Offset Printing, h. 78
- Mulyasa. (2002) *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. h
- Nasir, (2011) Ridlwan. *Antologi Kajian Islam*. Surabaya: PPs IAIN Sunan Ampel Press, 2011.

- Nurkholis, (2003) *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model, dan Aplikasi*. Jakarta: Grasindo, h. 40-41
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2006.
- Subakir, Supriyono. (2001) *Manajemen Berbasis Sekolah*. Surabaya: Anggota IKAPI, :Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Melalui Pemberdayaan Masyarakat, Otonomi Sekolah Dan Pembelajaran Aktif, Kreatif dan Menyenangkan, h. 05
- Salam, Darma Setyawan, (2001). *Otonomi Daerah dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumberdaya*. Jakarta: Djambatan, h. 74
- Wachid, Abdul. (2002) *Manajemen Berbasis Sekolah: Ikhtisar Menuju Madrasah Yang Mandiri Dalam Dinamika Pesantren Dan Madrasah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 266